

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKOWISATA PADA
DAERAH PESISIR Di DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
KABUPATEN WAKATOBI**

Srinandini

Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Srinandini641@gmail.com

Yusuf Hariyako

Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Muhammad Roisul Basyar

Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yusufhari@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan pengembangan ekowisata merupakan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk mempromosikan dan mengelola pariwisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata pada daerah pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang digunakan dalam pengembangan ekowisata di Desa Kulati telah memenuhi indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan pengembangan ekowisata di Desa Kulati untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pengembangan Ekowisata, Masyarakat*

ABSTRACT

Ecotourism development policy is a series of strategic steps designed to promote and manage tourism by paying attention to environmental sustainability, social justice and economic benefits for local communities. The research aims to describe the evaluation of ecotourism development policies in coastal areas in Kulati Village, East Tomia District, Wakatobi Regency. This research uses a descriptive qualitative research type. The results of this research show that the policies used in developing ecotourism in Kulati Village have met the success indicators for realizing ecotourism development in Kulati Village to improve more optimal results for the community and the environment.

Keywords: Policy, Ecotourism Development, Community

A. PENDAHULUAN

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata kearah alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonsevasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata dapat tumbuh di semua sektor industri pariwisata yang dapat membawa manfaat yang penting di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan pertumbuhan masyarakat, penjabaran tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perkembangan sektor ekowisata menjadi isu penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam pengembangan ekowisata dapat menumbuhkan penyediaan kesempatan kerja, serta tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata yang kini dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Parawisata menjadi salah satu kebutuhan manusia.

Kebijakan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan memerlukan evaluasi untuk dapat meninjau sejauh mana target yang telah tercapai, aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan agar menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat di waktu yang akan datang. Kemajuan dari suatu program yang terdapat pada suatu kebijakan. Kebijakan pengembangan ekowisata diharapkan mampu memberikan dampak positif seperti peningkatan pendapatan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk meninjau pencapaian target, memperbaiki kekurangan, dan mempertahankan aspek-aspek yang berhasil, sehingga kebijakan di masa mendatang lebih bermanfaat.

William N. Dunn mengatakan, evaluasi perlu dilakukan karena masih terdapat kebijakan yang belum berjalan berdasarkan rencana yang ditetapkan di awal. Tidak tercapainya tujuan kebijakan disebabkan oleh kurangnya daya antisipasi para pembuat kebijakan, pemerintah selaku pembuat kebijakan tentu menginginkan agar tujuan dari kebijakan ini dapat terlaksana maka evaluasi kebijakan perlu dilakukan. Kebijakan memerlukan evaluasi untuk dapat meninjau sejauh mana target yang telah tercapai, aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan agar menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat di waktu yang akan datang. Kemajuan dari suatu program yang terdapat pada suatu kebijakan dapat dilihat melalui evaluasi. Desa Kulati merupakan salah satu desa yang kaya dengan objek wisata yang kini diminati oleh masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ekowisata di Desa Kulati, kebijakan pengembangan pada objek wisata di Desa Kulati kini di tuntut untuk berinovasi guna memberikan suatu evaluasi kebijakan yang maksimal guna dapat mewujudkan kebijakaan yang baik.

Desa Kulati di Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam ekowisata. Dikenal sebagai desa wisata sejak tahun 2016, Desa Kulati terus berupaya mengembangkan berbagai objek wisata yang ada. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti kurang optimalnya pengelolaan objek wisata tertentu, masalah infrastruktur, dan fasilitas yang belum memadai.

Salah satu menjadi dampak pengembangan ekowisata di Desa Kulati yang mempunyai beberapa wisata yang sebenarnya tidak kalah menarik dibanding wisata yang lainnya. Tapi saat ini pengembangan wisata di daerah tersebut dirasa belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan diatas pada ojekt wisata yang letaknya di Liang Kuru-Kuri yang masih kurang berkembang bahkan terseskan terbengkalai. Dengan kendala mengenai status tanah yang masih milik masyarakat dan ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki dan tidak layak di pakai, seperti toilet dan Gazeboa dan ada beberapa infrastruktur jalan yang menuju objek wisata yang sudah tidak bisa lagi di gunakan. Berbagai kendala yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain mekanisme operasional pelaksanaan pengembangan ekowisata yang belum berjalan secara optimal. Pengembangan parawisata merupakan program jangka panjang dan tidak lepas dari upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian maka pengembangan parawisata harus berorientasi pada upaya melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan dapat diwujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kurang suksesnya pengembangan ekowisata di Desa Kulai selama ini tidak terlepas dari kurang tepatnya kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pemerintah di Kabupaten Wakatobi selama ini hanya berpihak pada mereka yang memiliki dana (Modal) tanpa memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat.

Melalui evaluasi kebijakan, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ada, serta ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pengembangan ekowisata di Desa Kulati. Dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, diharapkan pengembangan ekowisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini akan menelaah evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata di Desa Kulati, dengan fokus pada efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang-

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan penulis tertarik untuk meneliti terkait “Evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata pada daerah pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi” sehingga peneliti akan menelaah terkait pada evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata pada objek wisata di desa Kulati menjadi hal yang menarik perhatian peneliti

B. KAJIAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka sebagai komponen pendukung dalam penelitian ini yakni:

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)yaitu, pertama, kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kedua, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, ketiga, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip,

atau maksud sebagai pedoman garis untuk manajemen dalam usahamencapai sasaran, atau sebagai garis haluan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dandasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta,serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.Apabila hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnyahukum yang laki-lakigharuskan pembayaran pajak penghasilan),kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula. Merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi,termasu kidentifikasi. Berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakandalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan ataukeputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan(tujuan), program, keputusan (keputusan), standar, usulan, dan gradan desain.

Secara umum, istilah kebijakan atau "kebijakan" digunakan untukmenunjuk pada perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok,maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatifkemampuan untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadikurang mampu untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dansistem yang meliputi analisis kebijakan publik, oleh karena itu,kita memerlukannyabatasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti pemerintah, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkanpula pemerintahan yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta,dunia usaha maupun masyarakat madani (masyarakat sipil). Kebijakan pada intinyamerupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan dan manusia demi kepentingan publik, yaitu rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, Kompromi atau bahkan persaingan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan -kepentingan yang mewakili sistem politikk suatu negara.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahlimemberi pengertian kebijakan publik dalam hubungannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya, bahkan dalam pengertian yanglebih luas, kebijakan publik seringdiartikan sebagai 'apa saja yangdipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Seperti kata Bridgeman dan Davis, seringkali, kebijakan publik tidak lebih dari pengertian mengenai 'apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Kadangkadangk, kebijakanpublik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan

pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti pada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:229), evaluasi kebijakan jika tinjau secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang didalamnya mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan secara fungsional dipandang sebagai suatu tahapan akhir dalam proses implementasi kebijakan. Sebagai tapan akhir, proses ini memiliki posisi yang amat penting dan ditempatkan pada rangkaian yang terjadi setelah kebijakan publik diimpienatsikan. Namun betapapun ditempatkan pada fase akhir siklus kebijakan, evaluasi dapat dilakukan pada aktifitas fungsional kebijakan lainnya sehingga keseluruhan konsekuensi proses kebijakan dapat menjadi objek evaluasi tanpa harus menunggu implementasi kebijakannya (Basyarahil, 2011).

Menurut Lester dan Stewart Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut pendapat sebagian ahli kebijakan, evaluasi dimasukkan dalam tahap akhir siklus (proses) kebijakan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir namun masih ada tahap selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut. Sejatinya, kebijakan publik lahir mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, namun seringkali terjadi kebijakan tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu kebijakan dan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dilakukan evaluasi. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan (Maulana, 2015).

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan, sedangkan evaluasi kebijakan menurut Muhadjir dalam Hakim (2015) adalah proses penilaian tentang seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil dengan proses perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau terget kebijakan publik yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan publik pada prosesnya tidak hanya digunakan untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak ((impacts) tapi dapat juga untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan

Pada dasarnya adanya evaluasi kebijakan digunakan untuk dapat mengetahui hal terpenting yang didapatkan dari penetapan suatu kebijakan, menurut Alifuddin (2011:35) dalam Rahman et al. (2015) menyebutkan bahwa terdapat empat aspek penting dalam suatu kebijakan yang perlu diketahui melalui

adanya evaluasi kebijakan, yaitu: "proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan memiliki peranan penting sebagai fungsi pengawasan untuk dapat menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dalam rangka melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada

Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas terkait evaluasi kebijakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik yang tidak hanya untuk melihat hasil atau dampak (konsekuensi) tapi juga melihat bagaimana proses pelaksanaan secara objektif, sistematis dan empiris terhadap targetnya dari tujuan kebijakan publik yang sebelumnya telah dirumuskan

Konsep Ekowisata

Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, pada mulanya ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Proses kunjungan yang sebelumnya memanjakan wisatawan namun memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi.

Kebijakan pengembangan ekowisata merupakan implementasi sistem manajemen nasional yang melekat kepada sistem kelembagaan yang sedang berlaku. Kebijakan ekowisata dapat mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa ekowisata dengan sektor lain, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infrastruktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu kepada fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Lebih jauh, dalam banyak hal kebijakan ekowisata juga mengacu kepada perkembangan lingkungan global. Pengelolaan industri jasa pariwisata secara langsung berada dalam wewenang Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Ketiganya merupakan unsur pelaksana yang mengoperasionalkan ke dalam rambu-rambu pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan. Pemerintah daerah (Kemendagri) berperan dalam upaya mengkoordinasikan dan mengendalikan peran dan aliran manfaat kepada masyarakat, penduduk lokal dan swasta, melalui kebijakan penataan ruang, prosedur investasi dan perihal teknis lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian atau jenis penelitian dalam mengamati, menghasilkan dan mengelola data untuk penelitian kali ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.

Menurut Miles & Huberman (1992:15) berpendapat bahwa data kualitatif berwujud kata-kata bukan merupakan rangkaian angka, yang telah dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan selanjutnya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli.

Kriyantono dalam buku (Hidayat, 2012), bahwa Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian dengan tipe deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan selama melakukan penelitian tentang Bagaimana Evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata pada daerah pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. Metode kualitatif juga sering disebut dengan penelitian naturalistik atau pengembalian data secara alami.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi oleh penulis maka langkah atau tahapan berikutnya yang diambil dalam penelitian kali ini adalah menganalisis berdasarkan teori yang telah dipilih dan menjadi indikator acuan

Tori yang digunakan oleh penulis adalah teori yang dikemukakan oleh William D.Nunn. Hal tersebut dikarenakan sesuai hasil wawancara yang diberikan dengan memakai kebijakan dari Teori William D.Nunn untuk mengoptimalkan kebijakan melalui efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Mengenai indikator evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata yang meliputi:

1. Efektivitas

Menurut William D.Nunn Efektivitas adalah kebijakan yang dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi efektivitas kebijakan melibatkan pengukuran sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah yang ada.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, Kebijakan pengembangan ekowisata di Desa Kulati memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melestarikan lingkungan alam, mempromosikan budaya lokal, dan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan serta inklusif bagi seluruh warga desa. BUMDes telah berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan hampir memenuhi serta mengoptimalkannya bagi masyarakat Desa Kulati. Upaya tersebut mencerminkan komitmen BUMDes dalam memajukan desa melalui pengembangan ekowisata yang berdampak positif dan berkelanjutan. kebijakan pengembangan ekowisata di Desa Kulati yang bertujuan untuk mengembangkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya secara terintegrasi dan berkelanjutan. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan destinasi ekowisata yang menarik bagi wisatawan serta membawa manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Pengembangan ekowisata di Desa

Kulati diharapkan menjadi contoh sukses dari pariwisata berkelanjutan, yang memberikan kebaikan bagi alam, budaya, dan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan upaya serius dan terarah dari Dinas Pariwisata Wakatobi dalam memajukan pariwisata desa dengan prinsip keberlanjutan. Walaupun masih sebagian kecil masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya promosi budaya lokal.

2. Efisiensi

Efisiensi mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Kebijakan yang efisien menghindari pemborosan dan memaksimalkan output dengan biaya yang minimal.

Alokasi dana untuk proyek-proyek ekowisata di Desa Kulati telah digunakan secara optimal. Dana tersebut dialokasikan dengan hati-hati untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, dan promosi pariwisata. Pengawasan ketat terhadap setiap pengeluaran memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana. Hasilnya, banyak proyek yang berhasil, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan promosi budaya lokal. BUMDes berkomitmen untuk terus memaksimalkan penggunaan dana demi mencapai tujuan ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan, seperti infrastruktur jalan, toilet, parkir, dan tong sampah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, masih ada kebutuhan untuk penanganan lebih lanjut guna memastikan pengembangan ekowisata yang sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan ekowisata di Desa Kulati telah menggunakan berbagai sumber daya secara signifikan, termasuk waktu, tenaga, dan dana. Investasi besar dalam upaya ini telah menghasilkan beberapa pencapaian penting. Hasil dari kebijakan ini terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi lokal yang lebih baik. Penggunaan sumber daya yang optimal dan strategi yang terintegrasi telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal di Desa Kulati. Namun semakin meningkatnya kunjungan pertahunnya masih butuh atau perlu dipromosikan lagi ke luar daerah maupun mancanegara dengan semakin adanya promosi akan menjadi meningkatnya pendapatan masyarakat desa.

3. Kecukupan

Kecukupan mengacu pada penggunaan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang cukup memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk implementasi yang sukses.

Pada Infrastruktur dan fasilitas yang ada di objek wisata Desa Kulati saat ini telah memberikan dukungan yang memadai untuk pengembangan ekowisata. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan perbaikan yang perlu segera dilakukan karena banyak infrastruktur di beberapa objek wisata yang sudah rusak. Evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pengunjung serta memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Desa Kulati. Peningkatan infrastruktur yang rusak akan membantu meningkatkan pengalaman wisatawan dan menjaga keberlanjutan

lingkungan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Desa Kulati dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan fasilitasnya agar tetap relevan dengan kebutuhan pengunjung serta menjaga keberlanjutan lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama destinasi ekowisata tersebut. Kebijakan pengembangan ekowisata di Desa Kulati telah cukup berhasil memecahkan beberapa masalah utama dalam sektor pariwisata, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan alam, dan mempromosikan budaya lokal. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan masih perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan penuh.

4. Pemerataan

Pemerataan menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat dan kesempatan yang dihasilkan dari kebijakan didistribusikan secara adil di antara semua kelompok masyarakat. Ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Kebijakan pengembangan ekowisata di Desa Kulati telah cukup berhasil memecahkan beberapa masalah utama dalam sektor pariwisata, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan alam, dan mempromosikan budaya lokal. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan masih perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan penuh.

Dinas Pariwisata mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan serta preferensi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat terkait kebijakan ekowisata di Desa Kulati dengan melakukan survei dan konsultasi langsung dengan masyarakat. Mereka juga mengadakan forum atau pertemuan terbuka untuk mendengarkan masukan secara aktif, memastikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata.

5. Responsivitas

Responsivitas merujuk pada kemampuan kebijakan untuk merespons perubahan dan kebutuhan yang muncul dari lingkungan eksternal atau internal. Kebijakan yang responsif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi atau prioritas masyarakat.

BUMDes merespons keluhan atau saran dengan melakukan beberapa langkah konkret. Mereka mengadakan forum atau pertemuan rutin untuk mendengarkan secara langsung masukan dari pelaku wisata dan masyarakat lokal. Selain itu, BUMDesa menyediakan kotak saran dan membuka saluran komunikasi langsung agar semua masukan dapat terdokumentasi dengan baik. Tindak lanjut dilakukan dengan melakukan perbaikan layanan, peningkatan fasilitas pariwisata, dan adaptasi program ekowisata sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik yang diterima. Pendekatan ini memastikan bahwa BUMDesa dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata secara berkelanjutan.

Dinas Pariwisata menggunakan berbagai metode seperti survei, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan pertemuan komunitas untuk mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat. Data dan masukan yang dikumpulkan dari proses ini digunakan untuk menyesuaikan kebijakan dan program ekowisata. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang

diimplementasikan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari setiap kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, Dinas Pariwisata berupaya untuk membangun strategi pariwisata yang berkelanjutan, mendukung partisipasi aktif masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh di Desa Kulati.

6. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada sejauh mana kebijakan dirancang dan diimplementasikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang tepat akan menghasilkan dampak yang sesuai dan diharapkan.

Kebijakan ekowisata di Desa Kulati dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama yang berpusat pada keberlanjutan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemeliharaan warisan budaya. Melalui pendekatan ini, tujuan kebijakan mencakup pelestarian sumber daya alam yang unik, seperti keanekaragaman hayati dan ekosistem alam, sambil memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata alam dan budaya yang dimiliki Desa Kulati. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebijakan ini berusaha memastikan bahwa manfaat dari aktivitas ekowisata dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan manfaat dari ekowisata, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dengan pelestarian lingkungan alam. Dengan demikian, kesimpulan dari tujuan kebijakan ekowisata di Desa Kulati adalah untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mendukung kehidupan masyarakat lokal dan melestarikan kekayaan alam serta budaya yang dimiliki desa tersebut.

Dinas Pariwisata melaksanakan pendekatan holistik dengan melakukan monitoring berkelanjutan, evaluasi dampak sosial-ekonomi dan lingkungan, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam penilaian berkala terhadap kebijakan ekowisata. Berdasarkan hasil evaluasi ini, mereka dapat menyesuaikan kebijakan dengan tujuan agar tetap efektif dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dengan melakukan monitoring yang berkelanjutan, Dinas Pariwisata dapat mengamati perkembangan dan perubahan yang terjadi seiring waktu terhadap kebijakan ekowisata. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Evaluasi terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan membantu dalam menilai kontribusi kebijakan ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, pelestarian lingkungan alam, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini juga mengarah pada identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian dalam implementasi kebijakan. Melalui pelibatan aktif pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, dan pemerintah lokal, Dinas Pariwisata memastikan bahwa perspektif dan masukan dari berbagai pihak diintegrasikan dalam penilaian kebijakan. Ini meningkatkan legitimasi kebijakan dan mendukung penerimaan luas dari masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis yang membahas tentang “Bagaimana Evaluasi kebijakan pengembangan ekowisata pada daerah pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi” dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kebijakan Pengembangan Ekowisata di Desa Kulati bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan Pengembangan Ekowisata di Desa Kulati terurai menjadi enam indikator dalam proses kebijakan, hal ini sebabkan kebijakan pada indikator berikut:

1. Efektivitas:

Kebijakan ini menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Masyarakat Desa Kulati diberdayakan melalui pelatihan dan pendidikan mengenai praktik-praktik ekowisata yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata sangat ditekankan. Pada Program pelatihan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam manajemen ekowisata, yang berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan wisata dan kepuasan wisatawan. Program ini melibatkan masyarakat dalam menjaga ekosistem lokal, yang berhasil melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan daya tarik wisata.

2. Efisiensi:

Kebijakan ini memprioritaskan upaya konservasi lingkungan, termasuk reboisasi, pengelolaan sampah, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Semua kegiatan ekowisata dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Upaya konservasi lingkungan menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan ini. Program-program yang mendukung pelestarian alam, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan perlindungan keanekaragaman hayati, diimplementasikan secara konsisten. Dengan adanya implementasi teknologi informasi, seperti aplikasi panduan wisata dan sistem reservasi online, meningkatkan efisiensi operasional dan akses informasi bagi wisatawan. Melalui kemitraan strategis, desa dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan menekan biaya operasional.

3. Kecukupan:

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pariwisata dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan tanpa merusak ekosistem alami. Ini termasuk akses jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya. Pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan akomodasi yang memadai memastikan kenyamanan wisatawan dan meningkatkan daya saing destinasi. Penambahan tenaga kerja terlatih yang cukup di berbagai bidang ekowisata, termasuk pemandu wisata, pengelola penginapan, dan tim konservasi, memastikan pelayanan yang memadai.

4. **Pemerataan:**
Desa Kulati mengembangkan berbagai produk wisata menarik yang mencakup wisata alam, budaya, dan petualangan, memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal untuk menarik berbagai segmen wisatawan dan memperpanjang masa tinggal mereka. Program ini memastikan distribusi manfaat ekonomi ekowisata yang merata di antara seluruh anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Kebijakan ini dirancang untuk melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga semua mendapatkan manfaat dari ekowisata.
5. **Responsivitas:**
Kebijakan ini juga mencakup strategi promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas Desa Kulati sebagai destinasi ekowisata unggulan. Kerjasama dengan agen travel, media, dan platform digital dimaksimalkan untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Masyarakat lokal dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memastikan kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dibangun mekanisme untuk menerima dan merespons masukan dari wisatawan dan masyarakat, yang membantu dalam perbaikan berkelanjutan program ekowisata dan studi awal dilakukan untuk memahami potensi dan kebutuhan ekowisata, sehingga program yang dikembangkan tepat sasaran. Evaluasi rutin dilakukan terhadap program-program ekowisata untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan awal dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
6. **Ketepatan:**
Pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait menetapkan regulasi yang jelas untuk mengatur aktivitas ekowisata. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Regulasi yang jelas ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatur aktivitas ekowisata. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan semua kegiatan pariwisata sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian dan studi awal dilakukan untuk memahami potensi dan kebutuhan ekowisata, sehingga program yang dikembangkan tepat sasaran. Evaluasi rutin dilakukan terhadap program-program ekowisata untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan awal dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2020). *Buku Penunjang Disertasi*. Grafindo Persada.
- Al Hudib, H., & Cousins, J. B. (2022). Understanding Evaluation Policy and Organizational Capacity for Evaluation: An Interview Study. *American Journal of Evaluation*, 43(2).
- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. *E-Journal Unesa*, 1–16.
- Alifuddin, M. (2011). Kebijakan Pendidikan Non Formal. *Jakarta Timur: MAGNAScript Publishing*.

- Andri, Puspita, N., & Darmawan, F. (2019). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Pulau Untung Jawa. *Journal of Tourism Destinantion and Attraction*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/tourism.v7i1.781>
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Basyarahil, A. (2011). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan*. *Ilmiah Administrasi Negara*.
- Diki, W. O. K. (2011). *Pengembangan Ekowisata Dan Pengaruhnya Pada Perekonomian Daerah Di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Dunn, N. W. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University.
- Hakim, M. L. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Halimah, N. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–172.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Tidar*, Y. H., Muryani, C., & Ahmad, A. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Di Kawasan Objek Wisata Panati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021. *Journal of Environment and Disaster*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.20961/ijed.v1i1.61> Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *JUMPA*, 6(1), 63–86.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning- An Integrated Sustainable Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun. (2005). *Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata*. Presiden Republik Indonesia.
- Khairunnisa, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Blue Lagon, Sleman Yogyakarta. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 205–216.
- Maulana, R. (2015). Model dan Jenis-jenis Evaluasi Kebijakan. *Diambil Dari: Rizkie-Library.Blogspot.Co.Id/2015/12/Model-Dan-Jenis-Jenis-Evaluasikebijakan.Html*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. *Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun. (2009). Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah. *Menteri Dalam Negeri*.
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8).
- Rahman, W. Y., Murniati, & Djailani. (2015). Analisis Kebijakan Pendidikan Keluarga Dalam Memantapkan Perilaku Moral Anak di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 104–115.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Rusman. (2009). Manajemen Kurikulum. *Seri II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sanjaya, R. bagus. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kementul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05(01), 91–110.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v05.i01.p05>
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sudjana, D. (2006). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Sudjana, S. (2000). Strategi Pembelajaran. *Bandung: Falah Productio*.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: CV. Alfabeta*.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Suryani, S., & Sari, S. N. (2021). Tinjauan Geografis Pengembangan Objek Wisata Pantai Huntete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. *Indonesian Journal of Geography Education*, 2(2), 112–129.
- Swarbrooke. (1996). Pengembangan Pariwisata. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Syukri, S., Fithra, H., & Akmal, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Parawisata di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak. *Jurnal Transparan Publik (JTP)*, 2(1).
- Tyler, R. W. (1950). Basic Principles of Curriculum and Instruction. *Syllabus for Education 360. Chicago: The University of Chicago Press*.
- Wahab, S. (1996). *Manajemen Kepariwisataaan*. PT. Pradnya Paramita.
- Wazni, W., Harirah, MS, Z., & Darmansyah, R. (2020). Evaluasi Input Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Siak. *Sebatik*, 24(2), 178–186.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1124>
- Winarno. (2012). Kebijakan Public : Toeri, Proses, Dan Studi Kasus. *Yogyakarta: CAPS*.
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik. *PT. Buku Kita: Jakarta*.